

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **a. KESIMPULAN**

Pembangunan berpekstif gender merupakan pengintegrasian antara pembangunan dan masalah gender untuk menyelesaikan permasalahan gender di sebuah pemerintahan. Peningkatan peran gender dalam partisipasi publik sangat diperlukan di dalam sebuah pemerintahan. Berdasarkan analisis melalui beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat tentang anggaran responsif gender dapat disimpulkan :

1. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan anggaran responsif gender dan menangani permasalahan gender di Kabupaten Tuban hanya sebatas nominal dalam penjabaran APBD. Karena dari tahun 2014-2016 tidak ada dokumen *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*. Hal yang paling penting untuk masalah gender adalah data pilah gender yang tidak dipunyai pemerintah Kabupaten Tuban. Hal tersebut tidak ada di pemerintah Kabupaten Tuban sehingga akan menyulitkan pemerintah Kabupaten Tuban membuat dokumen *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*. Perencanaan masalah gender dari tahun 2014-2016 tidak ada perubahan sama sekali. Mempunyai indikator yang sama. Hal ini tentu dianggap

sebagai komitmen yang sangat rendah dari pemerintah Kabupaten Tuban untuk lebih responsif gender.

2. Alokasi belanja dalam APBD Kabupaten Tuban terdapat anggaran responsif gender namun tidak menggunakan *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*. Dalam alokasi belanja APBD juga sangat minim dengan angka 3,5% tahun 2014, 3,8% tahun 2015, dan 1,9% tahun 2016. Bahkan, penyerapan anggaran pada tahun 2016 sangat jauh dari tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014 dan 2015 mencapai angka diatas 95%, pada tahun 2016 hanya 78,87%. Hal ini tentu tidak akan berdampak signifikan untuk menyelesaikan masalah gender di Kabupaten Tuban.

#### **b. SARAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran responsif gender adalah sebagai berikut:

1. Dibuat suatu peraturan dari Pemerintah pusat dan provinsi mengenai pentingnya sosialisasi melalui sebuah kampanye yang intensif mengenai pelaksanaan anggaran responsif gender dan menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement* dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan bagi Bupati/Walikota, Kepala Bappeda, dan Kepala SKPD.
2. Agar memudahkan dalam melaksanakan anggaran responsif gender, maka Pemerintah harus menyusun data pilah gender untuk seluruh SKPD, serta

membuat instrumen untuk mengukur target dan capaian dalam anggaran responsif gender berdasarkan kriteria-kriteria dan indikator-indikator penting dari setiap kategori anggaran gender. Pemerintah Kabupaten Tuban bisa bekerja sama dengan tenaga ahli bidang analisis anggaran, seperti perguruan tinggi, khususnya pusat studi gender, atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dalam mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender yang ada sehingga penyusunan rencana kebijakan atau program kegiatan yang dibuat bisa memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.